



LAPORAN KINERJA 2023



Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah III Pontianak

KATA PENTING TARTAR

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dalam pelaksanaannya Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang berada di daerah. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III serta pertanggung jawabannya, diperlukan Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja (LKj) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan ini seluruh kegiatan yang dilaksanakan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Tahun 2023 secara umum mengacu pada Renstra Perubahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 - 2024 dan Renstra Perubahan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2020 - 2024.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama untuk peningkatan kinerja seluruh elemen di Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak.

Pontianak, Januari 2024

Kepala Balai,



Novie Trionoadi, S.Si., M. Sc

NIP. 19711129 199703 1 002

 Jl. Jenderal Ahmad Yani No.121 Pontianak

 bpkh3pontianak@gmail.com

 @bpkh3_pontianak

 bpkh3pontianak.menlhk.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Sumber Daya Manusia	4
D. Permasalahan yang sedang dihadapi	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategi (Renstra)	8
B. Rencana Kerja (Renja)	9
C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	12
D. Perjanjian Kinerja	13
E. Reviu atas Dokumen Perencanaan	16
BAB III. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI	
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	35
C. Penghargaan atas Prestasi Kinerja	37
BAB IV. PENUTUP	41
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Pegawai (PNS dan Tenaga Kontrak) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Desember 2023	6
Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Perubahan) Tahun 2023	10
Tabel 3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023	12
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023 (Sasaran Kinerja)	13
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023 (Rincian Output)	14
Tabel 6. Pagu Anggaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023	16
Tabel 7. Perhitungan Capaian Kinerja Sasaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023	21
Tabel 8. Perhitungan Efektifitas Capaian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023	23
Tabel 9. Progres Capaian Kinerja terhadap Renstra Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023	24
Tabel 10. Progres Capaian Kinerja terhadap Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023	26
Tabel 11. Perhitungan Efisiensi Capaian Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023	28
Tabel 12. Analisis Komponen Kegiatan yang mendukung Kinerja Kegiatan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023	30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Awal Kegiatan BPKHTL Wilayah III Tahun 2023
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan I Kegiatan BPKHTL Wilayah III Tahun 2023
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan II Kegiatan BPKHTL Wilayah III Tahun 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu sebagai media pertanggungjawaban maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj). LKj Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor SK.P.13/VII-SET/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bidang Planologi Kehutanan.

LKj menyajikan komponen – komponen yang meliputi Dokumen Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak telah menetapkan 11 (sebelas) rincian output dengan 11 (sebelas) indikator utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak sudah sebagian besar memenuhi sasaran kinerja yang direncanakan untuk mencapai sasaran strategis. Berikut rincian output dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan beserta tingkat capaiannya :

1. Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKH dengan rincian output :
 - Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL dengan capaian kinerja 100 %
2. Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH dengan rincian output :
 - Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL dengan capaian kinerja 100 %
3. Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKH dengan rincian output :
 - Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL dengan capaian kinerja 100%
4. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH dengan rincian output :
 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL dengan capaian kinerja 100%
5. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH dengan rincian output :
 - Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL dengan capaian kinerja 100%

6. Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH dengan rincian output :
 - Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH dengan capaian kinerja 100 %
7. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga dengan rincian output :
 - Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan dengan capaian 100 %
8. Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH dengan rincian output:
 - Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan dengan capaian kinerja 100 %
9. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel dengan rincian output :
 - Layanan Umum dengan capaian kinerja 100 %
 - Layanan Perkantoran dengan capaian kinerja 100 %
 - Layanan Sarana Internal dengan capaian kinerja 100 %

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu syarat pencapaian tata pemerintahan yang baik. SAKIP menekankan penerapan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil, sehingga pelaksanaannya akan membantu mewujudkan instansi pemerintah yang beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi maka disusunlah Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerja selama tahun 2023, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban secara administratif atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak pada Tahun 2023, dengan tujuan untuk

memberikan informasi tentang Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak tahun 2023 dan umpan balik bagi pengambil keputusan dalam rangka pemantapan perencanaan dan pelaksanaan pada masa berikutnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 6188/Kpts-II/2002 Tanggal 10 Juli 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.25/Menhut-II/2007 dan yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mencakup seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak menyelenggarakan fungsi, yaitu :

- a. Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. Pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. Penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;

- h. Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
- i. Pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
- l. Pelaksanaan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. Pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
- n. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut di atas, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai 3 (tiga) unit kerja setingkat eselon IV yang terdiri dari :

- A. Subbagian Tata Usaha
- B. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan
- C. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan

Disamping itu terdapat kelompok jabatan fungsional yang membantu tugas dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata lingkungan Wilayah III.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tanggal 26 Juli 2022, masing-masing seksi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

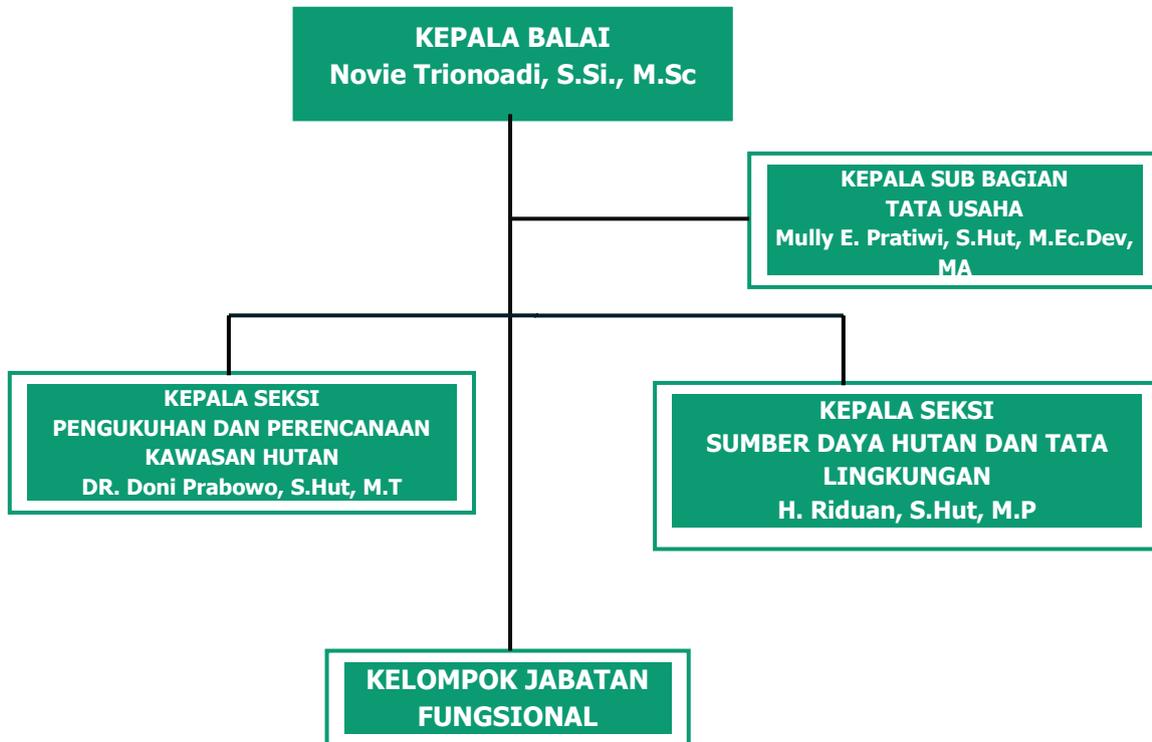
- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
- b. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan,

- persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
- c. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/ atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok ini membantu Kepala Balai dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian secara profesional sesuai dengan tingkat kebutuhan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai.

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 tanggal 26 Juli 2022, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan, Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Wilayah kerja BPKHTL Wilayah III Pontianak meliputi Provinsi Kalimantan Barat.

Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak

Dalam Pelaksanaan kegiatan sampai akhir bulan Desember 2023 BPKHTL Wilayah III Pontianak didukung oleh 45 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 37 orang dan pegawai kontrak sebanyak 8 orang. Jumlah Komposisi PNS dan PPNPN berdasarkan golongan dan Jumlah PNS dan PPNPN bedasarkan tingkat pendidikan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 1 : Komposisi Pegawai (PNS dan Tenaga Kontrak) berdasarkan Tingkat Pendidikan bulan Desember 2023

UNIT KERJA	Status Pegawai	S3		S2		S1		DIII		SMA		SMP		SD		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
BPKH Wilayah III Pontianak	PNS	1	-	4	3	10	4	5	2	6	2	-	-	-	-	26	11
	Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	-	-	7	1
JUMLAH	PNS	1	-	4	3	10	4	5	2	6	2	-	-	-	-	26	11
	Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-	-	-	7	1
TOTAL	PNS/Kontrak	1	-	4	3	10	4	5	2	12	3	1	-	-	-	33	12

D. Permasalahan yang sedang dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2023, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak menghadapi permasalahan sebagai berikut :

1. Terdapat dua kabupaten yang belum selesai PPTPKH yaitu di kabupaten Sambas dan Sintang prosesnya baru sampai pada rekomendasi inver yang di ajukan kepada Eselon I.
2. Terbatasnya SDM pada BPKHTL Wilayah III Pontianak yang memiliki kompetensi di bidang teknis kehutanan dan dokumen-dokumen lingkungan.
3. Verifikasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi Terkait Air merupakan kegiatan baru di BPKHTL yang menggunakan metode berbeda dengan tahun sebelumnya. Perubahan metode tersebut menimbulkan perubahan juknis yang baru diterima BPKHTL pada pertengahan tahun mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi terburu buru.
4. Pemegang IPPKH yang harus diverifikasi tidak sesuai dengan target yang direncanakan oleh Eselon I.



Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2020 - 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024. Tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020 – 2024 adalah *pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional dalam mendukung terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.*

Rumusan sasaran strategis pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator: 1) Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan, Amdal dan UKL/UPL;
5. terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;

6. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL.

B. Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat bagi BPKHTL Wilayah III Pontianak untuk menyelesaikan target-target sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2020 – 2024.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 disusun dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun sasaran pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk:

1. mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; serta
2. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKHTL Wilayah III Pontianak pada Tahun 2023, juga merupakan kegiatan untuk mendukung kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh pada tahun 2023 disusun dan kemudian dituangkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional. Terkait hal tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai salah satu bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan dalam mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu : memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Di dalam Laporan Kinerja (LKj) ini perjanjian kinerja yang digunakan adalah Perjanjian Kinerja Perubahan II Tahun 2023 yang telah ditandatangani pada Bulan Desember 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai

sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN-P Tahun Anggaran 2023.

Rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2023 berada pada 3 (tiga) program, dengan sasaran dan indikator Kinerja Kegiatan Program (perubahan) sebagai berikut :

WILAYAH	REKOR	TERMIN KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN BINA	INFORMASI KINERJA BINA	TARGET SOROK	TARGET BUKAN
Kebudayaan	M1. Mempertahankan warisan yang berkearifan dan kearifan lokal yang berkearifan	1.5. Rendah Lingkungan Hidup dan Nilai yang Sesuai di Kawasan Tersebut	11.01. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	11.01.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	028.72. Kualitas Lingkungan Hidup	11.01.1.1. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kegiatan usaha dan sektor serta usaha dan kegiatan	11.01.1.1.1. Tercapainya konsep Kebijakan Rencana Program (KRP) yang telah mengintegrasikan aspek lingkungan pembangunan berkelanjutan	83 Desember	156 Desember
			11.04. Peningkatan layanan jasa lingkungan hutan	11.04.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	028.71. Peningkatan Jasa Lingkungan Hutan	11.04.1.1. Meningkatkan Efisiensi implementasi Penetapan Kehutanan	11.04.1.1.1. Seluruh penataan kehutanan yang terdampak akibat, dan penataan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	181 Desember	206 Desember
			12.04. Meningkatkan Penetapan Kawasan Hutan	12.04.1. Sisa PMP Tunggakan K.H.	028.71. Peningkatan Jasa Lingkungan Hutan	12.04.1.1. Meningkatkan koordinasi PMP dan Penetapan Kawasan Hutan	12.04.1.1.1. Seluruh Penetapan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	087 Januari	502 Januari
			13.04. Meningkatkan Pemertan dan Informasi Karakter Daya Hutan	13.04.1.1. Data dan Informasi Karakter Daya Hutan	028.71. Peningkatan Jasa Lingkungan Hutan	13.04.1.1.1. Data dan Informasi Karakter Daya Hutan	13.04.1.1.1.1. Data dan Informasi Karakter Daya Hutan	31 Januari	31 Januari
Indonesia Plus yang Berkeadilan, Mandiri dan Berkeadilan Berkelanjutan "Terwujudnya"	M2. Mempertahankan warisan ekowisata sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan	1.2. Aktualisasi Pokok Kelas dan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup	12.04. Meningkatkan Penetapan Kawasan Hutan dan Tersebut	12.04.1. Sisa PMP Tunggakan K.H.	028.71. Peningkatan Jasa Lingkungan Hutan	12.04.1.1. Meningkatkan koordinasi PMP dan Penetapan Kawasan Hutan	12.04.1.1.1. Seluruh Penetapan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	180 Februari	300 Februari
			12.01. Meningkatkan Kualitas Layanan Hutan dengan Sistem dan Layanan	12.01.1. Laju Layanan Hutan dengan Sistem dan Layanan	028.71. Peningkatan Jasa Lingkungan Hutan	12.01.1.1. Meningkatkan Sistem Layanan yang telah ditetapkan sebagai layanan tetap	12.01.1.1.1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan) 100% termasuk Kawasan konservasi	14,8 Juli	16,4 Juli
			13.02. Meningkatkan Pemertan dan Informasi Karakter Daya Hutan	13.02.1. Laju Kemajuan Hutan yang Ekuivalen yang dipertan pada kawasan hutan TDR	028.71. Peningkatan Jasa Lingkungan Hutan	13.02.1.1. Meningkatkan pemertan kawasan hutan sesuai TDR	13.02.1.1.1. Seluruh kawasan hutan pemertan perubahan peruntukan telah selesai kawasan hutan	31 Agustus	31 Agustus
			14.02. Meningkatkan Pemertan dan Informasi Karakter Daya Hutan	14.02.1. Sisa Sertifikasi Kehutanan Berkelanjutan dan Berkeadilan	028.71. Peningkatan Jasa Lingkungan Hutan	14.02.1.1. Meningkatkan pemertan kawasan hutan sesuai TDR	14.02.1.1.1. Laju kemajuan hutan yang dipertan sesuai TDR	18,3 Ribu Hektar	21,24 Ribu Hektar
M4. Mempertahankan warisan yang berkearifan	1.4. Tata Laksana pemertan dan Informasi Karakter Daya Hutan yang Sesuai dan Berkeadilan	14.02. Meningkatkan Pemertan dan Informasi Karakter Daya Hutan	14.02.1. Sisa Sertifikasi Kehutanan Berkelanjutan dan Berkeadilan	028.71. Peningkatan Jasa Lingkungan Hutan	14.02.1.1. Meningkatkan pemertan kawasan hutan sesuai TDR	14.02.1.1.1. Laju kemajuan hutan yang dipertan sesuai TDR	02 Pebru	02 Pebru	

Dari 3 (tiga) program yang ada pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak pada tahun 2023 akan melaksanakan ketiga program tersebut yaitu **Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen**. Selanjutnya, penjabaran lebih lanjut dari ketiga program tersebut ke dalam Kegiatan BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- A. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang terdiri dari :
1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
 - Inventarisasi, Verifikasi dan BATB obyek TORA dalam Kawasan Hutan, 1 Rekomendasi Kebijakan
 - Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan, 1 Rekomendasi Kebijakan
 2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang terdiri dari :
 - Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL, 7 Layanan
 - Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL, 1 Layanan
 3. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang terdiri dari :
 - Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL, 2 Badan Usaha
- B. Program Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari :
1. Pencegahan Dampak Lingkungan
 - Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL, 1 Layanan
 - Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL, 1 Layanan
 - Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL, 1 Dokumen
- C. Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari :
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
 - Layanan Umum, 1 Layanan
 - Layanan Perkantoran, 1 Layanan

- Layanan Sarana Internal, 12 Unit

C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, BPKHTL Wilayah III Pontianak mengelola anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 15.718.584.000,- (*lima belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah*). Dengan rincian rencana kerja dan anggaran sebagai berikut :

Kode	Program	Target	Pagu Anggaran
029.06.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		820.000.000
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan		820.000.000
5436.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	Dokumen	100.000.000
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	50.000.000
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	50.000.000
5436.QMA	Data dan Informasi Publik	Dokumen	100.000.000
5436.QMA.002	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	1 Dokumen	720.000.000
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		7.299.236.000
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		6.623.966.000
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Rekomendasi Kebijakan	6.623.966.000
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	6.548.966.000
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	75.000.000
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		555.270.000
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	Layanan	555.270.000
5434.BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	7 Layanan	467.925.000
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	87.345.000
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		120.000.000

6744.BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Badan Usaha	120.000.000
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2 Badan Usaha	120.000.000
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen		7.599.348.000
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		7.599.348.000
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	7.232.832.000
5432.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	873.900.000
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	6.358.932.000
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	366.516.000
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	12 Unit	366.516.000

D. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2023 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mempunyai sasaran sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan				
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Dokumen
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan				
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	7	7	Klaster
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Layanan

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III.	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan				
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	2	2	Unit
IV.	Terselesainya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap				
1.	Terselesainya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	-	-	Km
V.	Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA				
1.	Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Provinsi
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	82	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

Dokumen Perjanjian Kinerja (Perubahan II) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.QAH	Pelayanan publik lainnya	2	2	layanan
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QMA	Data dan Informasi Publik			
5436.QMA.002	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	1	1	Dokumen

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	2	2	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	8	8	Layanan
5434.BMA.002	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	7	7	Layanan
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
6744.BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	2	2	Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2	2	Badan usaha
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	2	Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	1	1	Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12	12	Unit
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	12	12	Unit
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	-	-	Unit

Untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis yang tercantum dalam perjanjian kinerja (perubahan II) tahun 2023 tersebut Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mendapat anggaran sebesar Rp 15.718.584.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Anggaran
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	
1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp. 6.623.966.000
2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 555.270.000
3. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 120.000.000
Program Kualitas Lingkungan Hidup	
4. Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp. 820.000.000
Program Dukungan Manajemen	
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp. 7.599.348.000
TOTAL ANGGARAN	Rp.15.718.584.000

E. Reviu atas Dokumen Perencanaan

Berdasarkan DIPA Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-029.06.2.427397/2023 tanggal 30 November 2022 adanya perubahan atas dokumen perencanaan. Terdapat perubahan anggaran yang dikelola oleh BPKHTL Wilayah III Pontianak pada Tahun 2023 yang semula sebesar Rp. 8.514.732.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2023 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, menjadi sebesar Rp. 15.718.584.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Bulan Desember 2023 tentang Perubahan II Perjanjian Kinerja. Perubahan alokasi anggaran dikarenakan adanya penambahan anggaran yang bersumber dari dana PNBK-PKH dan blokir anggaran belanja pegawai serta blokir kegiatan program kualitas lingkungan hidup dengan rincian sebagai berikut :

- Perjanjian kinerja awal pagu anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 8.514.732.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan blokir anggaran sebesar Rp. 912.500.000,- untuk blokir *Automatic Adjustment* (AA) belanja pegawai sebesar Rp. 92.500.000,- dan blokir belum ada kesepakatan TM sebesar Rp. 820.000.000,-
- Perjanjian kinerja perubahan pertama pagu anggaran Tahun 2023 bertambah menjadi sebesar Rp. 15.811.614.000,- yang berasal dari tambahan PNBK-PKH sebesar Rp.

7.296.882.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.28/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Perubahan I)

- Perjanjian kinerja perubahan kedua pagu anggaran Tahun 2023 berkurang menjadi sebesar Rp. 15.718.584.000,- sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor S.1269/SET.2/PEHKT/KEU.1/11/2023 Tanggal 20 November 2023 tentang Pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja barang operasional antar-satker, dimana pagu BPKHTL Wilayah III Pontianak berkurang sebesar Rp. 93.030.000,-



Kegiatan Penandaan Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Umum dari Desa Pematang Gadung Menuju Ruas Jalan Pelang - Batu Tajam Atas Nama Pemerintah Kabupaten Ketapang (September 2023)



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Metode Pengukuran

a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan kesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan $= 1$ bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 , menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran efisiensi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}} \times 100\%$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Sedangkan apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Skala pengukuran kinerja yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

85% - 100% = Kinerja sangat baik

70% - <85% = Kinerja baik

55% - <70% = Kinerja cukup baik

<55% = Kinerja kurang baik

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Kinerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2023. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari perhitungan sebagaimana pada tabel berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET (VOLUME)	REALISASI (VOLUME)	% CAPAIAN KINERJA
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan					
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumber daya hutan					
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	7 Layanan	7 Layanan	100
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	100
III.	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan					
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	100
IV.	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap					
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
V.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA					
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET (VOLUME)	REALISASI (VOLUME)	% CAPAIAN KINERJA
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK					
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
		2. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
		3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Layanan Sarana Internal	12 Unit	12 Unit	100
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA						100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak pada tahun 2023 adalah sebesar 100 %.

Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan dalam penilaian persentase pencapaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak tahun 2023 dari 8 (delapan) sasaran kegiatan serta 11 (sebelas) indikator kinerja dan rincian output, semuanya berhasil mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % sehingga berada pada skala 85 % - 100 % dengan kriteria kinerja **sangat baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja Tahun 2023 suatu output dengan persentase capaian kinerja di Tahun 2022.

Perhitungan Efektivitas capaian kinerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	% CAPAIAN TAHUN 2022	% CAPAIAN TAHUN 2023	EFEKTIVITAS CAPAIAN KINERJA
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan					
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	100	100	1
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	-	100	-
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	100	1
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumber daya hutan					
1.	Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	100	1
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	100	100	1
III.	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan					
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	-	100	-
IV.	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap					
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	100	100	1
V.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA					
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	100	100	1
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK					
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	100	100	1
		2. Level Maturitas SPIP Direktorat	Layanan Perkantoran	100	100	1

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	% CAPAIAN TAHUN 2022	% CAPAIAN TAHUN 2023	EFEKTIVITAS CAPAIAN KINERJA
	Lingkungan	Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Layanan Sarana Internal	-	100	-
RATA - RATA EFEKTIVITAS CAPAIAN KINERJA						0,72

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Restra 2020-2024, sehingga perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dilakukan dengan membandingkan dengan realisasi tahun ketiga pelaksanaan Restra 2020-2024 terhadap 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan tabel di atas.

Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa ada 3 (tiga) rincian output yang baru dilaksanakan pada tahun 2023, ketiga rincian output tersebut adalah Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL, Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL dan Layanan Sarana Internal. Dimana ketiga rincian output tersebut mendapat capaian kinerja sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

Progres capaian kinerja terhadap target renstra pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET 5 TAHUN (RENSTRA)	REALISASI PER TAHUN (PERIODE RENSTRA)					TOTAL REALISASI S.D THN YBS	% REALISASI KUMULATIF TERHADAP TARGET 5 TAHUN
					2020	2021	2022	2023	2024		
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan										
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Wilayah Kerja BPKHTL	3 Layanan	-	-	1	1	-	2	66,66

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET 5 TAHUN (RENSTRA)	REALISASI PER TAHUN (PERIODE RENSTRA)					TOTAL REALISASI S.D THN YBS	% REALISASI KUMULATIF TERHADAP TARGET 5 TAHUN
					2020	2021	2022	2023	2024		
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Dokumen	-	-	-	1	-	1	100
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	3 Layanan	-	-	1	1	-	2	66,66
II. Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumber daya hutan											
1.	Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	48 Klaster	15	3	4	7	-	29	60,41
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	5 Layanan	1	1	1	1	-	4	80
III. Meningkatnya sumbangan PNPB dari Penggunaan Kawasan Hutan											
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	15 Badan Usaha	7	3	-	2	-	12	80
IV. Tereleaksikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap											
1.	Tereleaksikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	4 Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	-	3	75
V. Tereleaksikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA											
1.	Tereleaksikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	5 Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	-	4	80
VI. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK											
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Layanan Umum	5 Layanan	1	1	1	1	-	4	80
			Layanan Perkantoran	5 Layanan	1	1	1	1	-	4	80
			Layanan Sarana Internal	121 Unit	33	62	-	12	-	107	88,43

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024 dilakukan untuk mengetahui capaian tahun keempat Renstra tersebut, yang digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mencermati perkiraan capaian pada akhir tahun 2024. Dengan demikian, langkah-langkah antisipatif dapat ditemukan lebih awal. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ada 1 (satu) indikator kinerja yang sudah tercapai targetnya yaitu Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH, dan 9 (sembilan) indikator yang sesuai target pelaksanaan pertahunnya. Selain itu ada 1 (satu) indikator kinerja yang perlu diambil langkah antisipatif pada tahun 2023 supaya dapat mencapai target renstra lebih maksimal yaitu Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renja DPKTL Tahun 2023

BPKHTL Wilayah III Pontianak dalam merencanakan kegiatan dan unit kegiatannya selalu memperhatikan Renja Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus menyumbang keberhasilan pencapaian target DPKTL Tahun 2023. Tabel dibawah ini memperlihatkan persentase pencapaian kinerja BPKHTL Wilayah III Pontianak terhadap target Renja DPKTL Tahun 2023.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RENJA BPKHTL WIL.III TAHUN 2023		TARGET RENJA DPKTL TAHUN 2023	% CAPAIAN TERHADAP RENJA DPKTL
		TARGET (VOLUME)	REALISASI (VOLUME)		
Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	22 Layanan	4,5
Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	20 Layanan	5
Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	22 Layanan	4,5
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	7 Layanan	7 Layanan	44 Layanan	15,9

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	RENJA BPKHTL WIL.III TAHUN 2023		TARGET RENJA DPKTL TAHUN 2023	% CAPAIAN TERHADAP RENJA DPKTL
		TARGET (VOLUME)	REALISASI (VOLUME)		
Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	1 Layanan	22 Layanan	4,5
Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	100 Badan Usaha	2
Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	22 Rekomendasi Kebijakan	4,5
Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	4 Rekomendasi Kebijakan	25
1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	23 Layanan	4,3
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	23 Layanan	4,3
	Layanan Sarana Internal	12 Unit	12 Unit	55 Unit	21,8

Tabel di atas menunjukkan persentase capaian kinerja BPKHTL Wilayah III Pontianak terhadap Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja tersebut terdapat 2 (dua) indikator yang menyumbang kinerja di atas 20%, indikator kinerja tersebut yaitu Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan sebesar 25% dan Layanan Sarana Internal sebesar 21,8%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum kegiatan yang direncanakan BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2023 untuk mendukung sasaran program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat terlaksana dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja 100%. Kegiatan Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan telah selesai dilaksanakan dan rekomendasi kebijakan hasil inver telah diserahkan ke Eselon I untuk kemudian dikeluarkan persetujuan pola perubahan

batas kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (pptpkh) oleh Menteri yang digunakan untuk pelaksanaan tata batasnya di tahun depan.

Sementara kegiatan pendukung lainnya termasuk layanan umum dan layanan perkantoran yang dimaksudkan untuk mewujudkan good governance telah sesuai dengan kerangka pembangunan reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal dan memiliki nilai capaian 100%.

f. Analisis Penggunaan atas Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja fisik dengan persentase realisasi anggarannya. Perhitungan efisiensi capaian kinerja pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	% CAPAIAN FISIK TAHUN YBS	% CAPAIAN KEUANGAN TAHUN YBS	EFISIENSI CAPAIAN KINERJA
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan					
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	100	99,59	1
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL	100	99,96	1
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	99,76	1
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumber daya hutan					
1.	Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	99,95	1
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	100	99,90	1
III.	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan					
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	99,99	1

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	% CAPAIAN FISIK TAHUN YBS	% CAPAIAN KEUANGAN TAHUN YBS	EFISIENSI CAPAIAN KINERJA
	penggunaan kawasan hutan					
IV.	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap					
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	100	99,97	1
V.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA					
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	100	99,98	1
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK					
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Layanan Umum	100	99,99	1
Layanan Perkantoran			100	99,97	1	
Layanan Sarana Internal			100	99,96	1	
RATA - RATA EFISIENSI CAPAIAN KINERJA						1

Dalam hal ini penggunaan atas efisiensi sumber daya dilihat dari efisiensi anggaran yang dihabiskan untuk merealisasikan target unit kegiatan. Saat unit kegiatan memiliki kategori target tercapai, maka perlu dilihat efisiensi sumber daya anggaran yang terjadi. Masing-masing unit kegiatan dijabarkan menjadi elemen kegiatan, sehingga elemen kegiatan dapat memiliki efisiensi anggaran, tetapi capaian kinerja dapat terealisasi. Dalam situasi yang demikian ini, sesungguhnya telah terdapat penggunaan atas efisiensi sumber daya. Dari tabel di atas dapat dilihat jika rata-rata efisiensi capaian kinerja BPKHTL Wilayah III Pontianak Tahun 2023 adalah sebesar 1 dimana berdasarkan pengukuran efisiensi jika rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien.

Pada program Kualitas Lingkungan Hidup memiliki 3 (tiga) indikator kegiatan yang memiliki capaian kinerja 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 820.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 819.401.054,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 598.946,- atau 0,07%. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan memiliki 5 (lima) indikator kegiatan dan kelima indikator kegiatan tersebut memiliki capaian kinerja 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.299.236.000,- realisasinya sebesar Rp. 7.296.797.904,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.438.096,- atau 0,03%. Dan terakhir program Dukungan Manajemen memiliki 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.599.348.000,- realisasinya sebesar Rp. 7.597.335.488,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.012.512,- atau 0,02%.

g. Analisis Unit Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Seluruh unit kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dimaksudkan untuk mendukung tercapainya kinerja 3 (tiga) program pada BPKHTL Wilayah III Pontianak. Analisis unit kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANALISIS KOMPONEN KEGIATAN YANG MENDUKUNG KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	<p>Program Eselon I : Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan Eselon II : Pencegahan Dampak Lingkungan</p> <p>Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan</p> <p>Komponen Kegiatan: Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor</p> <p>Hasil yang dicapai : Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 4,5% dan telah menunjang pencapaian program Kualitas Lingkungan Hidup.</p> <p>Outcome : Hasil kajian lingkungan mendukung hidup dapat penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program di provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan program Prioritas Nasional.</p>
Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di	1 Dokumen	1 Dokumen	<p>Program Eselon I : Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan Eselon II : Pencegahan Dampak Lingkungan</p> <p>Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANALISIS KOMPONEN KEGIATAN YANG Mendukung KINERJA KEGIATAN
	Wilayah Kerja BPKH			<p>Komponen Kegiatan: Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif</p> <p>Hasil yang dicapai : Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 5% dan telah menunjang pencapaian program Kualitas Lingkungan Hidup.</p> <p>Outcome : Hasil kajian lingkungan dari verifikasi peta indikatif jasa lingkungan mendukung layanan tata lingkungan untuk penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program di provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan program Prioritas Nasional.</p>
Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	<p>Program Eselon I : Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan Eselon II : Pencegahan Dampak Lingkungan</p> <p>Kegiatan : Pencegahan Dampak Lingkungan</p> <p>Komponen Kegiatan: Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan</p> <p>Hasil yang dicapai : Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 4,5% dan telah menunjang pencapaian program Kualitas Lingkungan Hidup.</p> <p>Outcome : Hasil kajian tata lingkungan bidang usaha dan kegiatan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan usaha dan kegiatan.</p>
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	7 Klaster	7 Klaster	<p>Program Eselon I : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</p> <p>Kegiatan Eselon II : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</p> <p>Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</p> <p>Komponen Kegiatan: Inventarisasi Hutan Nasional</p> <p>Hasil yang dicapai : Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 15,9% dan telah menunjang pencapaian program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.</p> <p>Outcome : Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi potensi sumber daya hutan digunakan sebagai bahan perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan, dan bahan perumusan kebijakan strategis jangka panjang, jangka menengah dan operasional jangka pendek agar diperoleh kelestarian hutan.</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANALISIS KOMPONEN KEGIATAN YANG Mendukung KINERJA KEGIATAN
	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	1 Layanan	<p>Program Eselon I : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</p> <p>Kegiatan Eselon II : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</p> <p>Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</p> <p>Komponen Kegiatan: Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional</p> <p>Hasil yang dicapai : Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 4,5% dan telah menunjang pencapaian program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.</p> <p>Outcome : <ul style="list-style-type: none"> Sebagai salah satu variabel dalam melakukan analisis ruang baik internal maupun eksternal KLHK (RPJMD, KLHS, dan kajian lainnya) Bahan perumusan penentuan kebijakan pembangunan sumber daya hutan (penghitungan emisi gas rumah kaca, penilaian kelayakan pemberian izin, penyusunan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, penyusunan data lahan kritis, dan penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru). </p>
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	<p>Program Eselon I : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</p> <p>Kegiatan Eselon II : Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</p> <p>Kegiatan : Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</p> <p>Komponen Kegiatan: Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan</p> <p>Hasil yang dicapai : Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 2% dan telah menunjang pencapaian program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.</p> <p>Outcome : Hasil verifikasi PNBP PKH akan digunakan untuk mengetahui kepatuhan pembayaran PNBP PKH dari masing-masing Wajib Bayar, yang selanjutnya akan menjadi penerimaan Negara dari sektor kehutanan.</p>
Terselesainya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	<p>Program Eselon I : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</p> <p>Kegiatan Eselon II : Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</p> <p>Kegiatan : Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANALISIS KOMPONEN KEGIATAN YANG Mendukung KINERJA KEGIATAN
				<p>Komponen Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan (Reguler)</p> <p>Hasil yang dicapai : Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 4,5% dan telah menunjang pencapaian program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.</p> <p>Outcome : Hasil tata batas kawasan hutan akan menjadi dasar bagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerbitkan SK Penetapan Kawasan Hutan.</p>
Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	<p>Program Eselon I : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</p> <p>Kegiatan Eselon II : Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</p> <p>Kegiatan : Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</p> <p>Komponen Kegiatan: Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan</p> <p>Hasil yang dicapai : Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 25% dan telah menunjang pencapaian program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.</p> <p>Outcome : Hasil rekomendasi inver tora akan menjadi dasar bagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerbitkan SK Persetujuan Pola Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTPKH)</p>
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel 	2 Layanan 12 unit	2 Layanan 12 Unit	<p>Program Eselon I : Program Dukungan Manajemen</p> <p>Kegiatan Eselon II : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</p> <p>Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</p> <p>Komponen Kegiatan: Layanan Dukungan Manajemen Satker BPKHTL, Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANALISIS KOMPONEN KEGIATAN YANG Mendukung KINERJA KEGIATAN
				<p>Hasil yang dicapai :</p> <p>Komponen kegiatan ini telah menunjang capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Menunjang kegiatan Eselon I sebesar 4,3% serta 21,8% untuk pengadaan sarana internal dan telah menunjang pencapaian program Dukungan Manajemen.</p> <p>Outcome :</p> <p>Hasil dari unit kegiatan ini dapat menjamin kinerja yang optimal dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga terbangunnya <i>good governance</i> sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi : SAKIP dengan nilai minimal 82 di Tahun 2023.</p>

h. Upaya Perbaikan ke depan

Ada beberapa upaya untuk perbaikan ke depan yang dilakukan oleh BPKHTL Wilayah III Pontianak melihat hasil capaian kinerja di Tahun 2023. Terkait sumber daya manusia, BPKHTL Wilayah III Pontianak telah Menyusun analisis beban kerja (ABK) sebagai dasar untuk pemenuhan personal baik dari sisi jumlah, maupun peningkatan status kepegawaiannya. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan uji kompetensi seluruh pegawai BPKHTL Wilayah III Pontianak untuk mengetahui tingkat leveling dari para pegawai selain itu juga mengikutsertakan pada diklat, kursus maupun bimbingan teknis.

Di akhir tahun 2023 BPKHTL Wilayah III mulai menggunakan fasilitas Whatsapp Bisnis untuk mempermudah komunikasi dengan para stakeholder. BPKHTL Wilayah III Pontianak juga telah menjalankan reformasi birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk memperkuat pencapaian target sasaran kinerja tahun 2023.

i. Dukungan terhadap Prioritas Nasional

Kegiatan tahun 2023 yang dilaksanakan BPKHTL Wilayah III Pontianak juga mendukung kegiatan Prioritas Nasional (PN). Ada 5 (lima) kegiatan yang mendukung terlaksananya Prioritas Nasional yaitu sebagai berikut :

- PN – 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, kegiatan yang dilaksanakan yaitu Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan
- PN – 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, kegiatan yang dilaksanakan yaitu Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan

- PN – 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, kegiatan yang dilaksanakan yaitu Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKHTL, Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL dan Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 untuk mendukung terlaksananya kegiatan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 15.718.584.000,- (lima belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Anggaran ini dialokasikan untuk :

- Belanja Pegawai Rp. 4.552.916.000,-
- Belanja Barang Rp. 10.799.152.000,-
- Belanja Modal Rp. 366.516.000,-

Realisasi keuangan sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar Rp 15.710.943.944,- (lima belas milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) atau 99,95 %. Berdasarkan data OMSPAN per 7 Januari 2024 Pagu dan realisasi keuangan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH III PONTIANAK

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode / Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Belanja Bunga	Subsidi	Hibah	BanSoc	LainLain	Transfer	
1	427911 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III PONTIANAK	PAJU REALISASI	4.552.916.000	10.799.152.000	366.516.000	0	0	0	0	0	0	15.718.584.000
		SISA	4.349.626.166	10.794.723.189	366.383.629	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.710.943.944
			(90,92%)	(99,94%)	(99,96%)						(99,95%)	
			3.089.235	4.418.641	132.188	0	0	0	0	0	7.640.069	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
GRAND TOTAL			4.552.916.000	10.799.152.000	366.516.000	0	0	0	0	0	15.718.584.000	
			4.349.626.166	10.794.723.189	366.383.629	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.710.943.944	
			(90,92%)	(99,94%)	(99,96%)						(99,95%)	
			3.089.235	4.418.641	132.188	0	0	0	0	0	7.640.069	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang dimaksudkan untuk mendukung tercapainya kinerja kegiatan bidang keplanologian dan tata lingkungan memiliki capaian nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 94,88.

Perhitungan nilai IKPA BPKHTL Wilayah III Pontianak berdasarkan aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut :

ID	KODE	KODE	KODE	KODE	KODE	KUALITAS PERFORMAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI	KETERANGAN	NILAI	KETERANGAN	
						REVISI	PERUBAHAN	REVISI	PERUBAHAN	REVISI	PERUBAHAN	REVISI	PERUBAHAN					
02	020	427007	SALAH	PEMANTAPAN	KAWASAN	HUTAN DAN	TATA	LINGKUNGAN	WILAYAH III	PONTIANAK	100.00	95.00	95.00	95.00	100.00	95.00	95.00	95.00
											100.00	95.00	95.00	95.00	100.00	95.00	95.00	95.00

5 NILAI & PENGELOMPOKAN IKPA

Kategori Nilai IKPA :

- o SANGAT BAIK : nilai IKPA ≥ 95
- o BAIK : $89 \leq$ nilai IKPA < 95
- o CUKUP : $70 \leq$ nilai IKPA < 89
- o KURANG : nilai IKPA < 70

Berdasarkan perhitungan nilai IKPA tersebut BPKHTL Wilayah III Pontianak termasuk kedalam kategori **BAIK**

Selain perhitungan nilai IKPA capaian kinerja BPKHTL Wilayah III Pontianak juga dihitung nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) berdasarkan perhitungan pada aplikasi

SMART DJA. Tahun 2023 BPKHTL Wilayah III Pontianak memiliki nilai EKA 85,71 termasuk kategori **Baik** yang terlihat pada grafik dbawah ini :



C. Penghargaan atas Prestasi Kinerja

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, mulai dari SDM hingga sarana dan prasarana BPKHTL Wilayah III Pontianak selalu berupaya untuk menjadi semakin lebih baik kepada seluruh pegawai dan juga mitra kerja yang telah membantu dalam suksesnya pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sehingga BPKHTL Wilayah III Pontianak menunjukkan kinerja yang positif.

Tahun 2023 BPKHTL Wilayah III Pontianak mendapat beberapa penghargaan yang pertama Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai satker yang lolos tahap seleksi administrasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023 oleh Kementerian PAN RB. Yang kedua, apresiasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura sebagai Mitra Magang dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Yang Ketiga BPKHTL Wilayah III Pontianak mendapat Sertifikat ISO 9001:2015 karena berhasil untuk menerapkan sistem manajemen mutu dalam pelayanan. Selanjutnya, penghargaan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas capaian realisasi anggaran pada tahun anggaran 2023 sebesar 99.95%. Yang terakhir apresiasi dari BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya karena telah mendukung dan berpartisipasi dalam Pencapaian Tata Batas Kawasan hutan 100% pada Provinsi Kalimantan Tengah.



Apresiasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura sebagai Mitra Magang dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)



Apresiasi dari BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya karena telah mendukung dan berpartisipasi dalam Pencapaian Tata Batas Kawasan hutan 100% pada Provinsi Kalimantan Tengah



Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di BPKHTL Wilayah III Pontianak



Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Capaian Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2023 Sebesar 99.95%

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa :

1. Terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja dari 11 (sebelas) rincian output berhasil mendapatkan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Realisasi anggaran sebesar Rp. 15.710.943.944,- dari pagu sebesar Rp. 15.718.584.000,- atau sebesar 99,95 %. Dengan nilai IKPA sebesar 94,88 dalam kategori **baik** dan nilai EKA pada aplikasi SMART DJA 85,71 yang termasuk kedalam kategori **baik**.
3. Dari point 1 sampai dengan 2 dapat disimpulkan bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak pada tahun 2023 mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar 99,95 % sehingga berada pada skala 85 % - 100 % dengan kriteria kinerja **sangat baik**.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

Pihak Pertama,

Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.
NIP. 19711129 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SATUAN KERJA : 427397. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III PONTIANAK

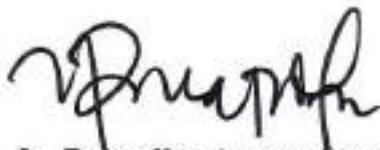
Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan	Terlaksananya Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	
5436.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL serta layanan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL serta layanan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	6 layanan
5434.BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	5 layanan
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	
6744.BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	Terlaksananya Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Badan usaha
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1. Nilai SAKIP Ditjen PKTL 2. Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL 3. Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	2 Layanan
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal	
5432.EBA.962	Layanan Umum	Terlaksananya Layanan Umum	1 Layanan

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	Terlaksananya Perkantoran Layanan	1 Layanan

Program/Kegiatan	Anggaran
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	
Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp. 820.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 415.270.000
Perencanaan Kawasan Hutan	Rp. 60.000.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp. 7.219.462.000
Jumlah	Rp. 8.514.732.000 Delapan miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah
Blokir Anggaran	Rp. 912.500.000 Sembilan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah

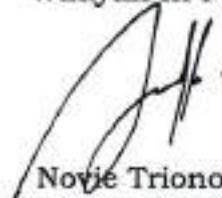
Jakarta, Januari 2023

Plt. Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

Kepala BPKHTL
Wilayah III Pontianak,



Novje Trionoadi, S.Si., M.Sc.
NIP. 19711129 199703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Pihak Pertama,

Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.
NIP. 19711129 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)

SATUAN KERJA : 427397. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III PONTIANAK

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (3)	TARGET		
			SEMULA (4)	MENJADI (5)	SATUAN (6)
(1)					
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan				
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Dokumen
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan				
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	5	7	Klaster
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Layanan
III.	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan				
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	2	Unit
IV.	Terselesainya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap				
1.	Terselesainya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	-	-	Km
V.	Terselesainya pelepasan kawasan hutan untuk TORA				

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (3)	TARGET		
			SEMULA (4)	MENJADI (5)	SATUAN (6)
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyektif TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	0	1	Provinsi
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	<p>Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</p> <p>Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</p> <p>Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel</p>	82	82	Poin
			3	3	Level
			1	1	Dokumen

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.QAH	Pelayanan publik lainnya	2	2	layanan
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QMA	Data dan Informasi Publik	1	1	Dokumen
5436.QMA.002	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	1	1	Dokumen
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	0	2	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	0	1	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	0	1	Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	6	8	Layanan
5434.BMA.002	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	5	7	Layanan
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
6744.BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	1	2	Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1	2	Badan usaha
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	2	Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	1	1	Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0	12	Unit

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	0	12	Unit

Program/Kegiatan	Anggaran	
	Semula	Menjadi
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp. 0	Rp. 6.623.966.000
2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 415.270.000	Rp. 555.270.000
3. Rencana dan Pengawasan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 60.000.000	Rp. 120.000.000
Program Kualitas Lingkungan Hidup		
4. Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp. 820.000.000	Rp. 820.000.000
Program Dukungan Manajemen		
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp. 7.219.462.000	Rp. 7.692.378.000
TOTAL ANGGARAN	Rp. 8.514.732.000	Rp. 15.811.614.000

Jakarta, September 2023

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Kepala BPKHTL Wilayah III
Pontianak

Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc.
NIP. 19711129 199703 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN II)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

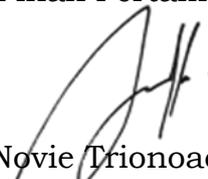
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Jakarta, Desember 2023
Pihak Pertama,


Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc
NIP. 19711129 199703 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN II)

SATUAN KERJA : 427397. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH III PONTIANAK

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan				
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Dokumen
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan				
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	7	7	Klaster
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Layanan
III.	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan				
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	2	2	Unit
IV.	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap				
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	-	-	Km

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
V.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA				
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Provinsi
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	82	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.QAH	Pelayanan publik lainnya	2	2	layanan
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
5436.QMA	Data dan Informasi Publik			
5436.QMA.002	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	1	1	Dokumen
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	2	2	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	8	8	Layanan
5434.BMA.002	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	7	7	Layanan
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
6744.BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	2	2	Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2	2	Badan usaha
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	2	Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	1	1	Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12	12	Unit

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	12	12	Unit
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	-	-	Unit

Program/Kegiatan	Anggaran	
	Semula	Menjadi
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp.6.623.966.000	Rp.6.623.966.000
2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp.555.270.000	Rp.555.270.000
3. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp.120.000.000	Rp.120.000.000
Program Kualitas Lingkungan Hidup		
4. Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp.820.000.000	Rp.820.000.000
Program Dukungan Manajemen		
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp.7.692.378.000	Rp.7.599.348.000
TOTAL ANGGARAN	Rp.15.811.614.000	Rp.15.718.584.000

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Jakarta, Desember 2023
Kepala BPKHTL Wilayah III Pontianak



Novie Trionoadi, S.Si., M.Sc
NIP. 19711129 199703 1 002